

NADHLATUL ULAMA DAN PLURALISME: Studi Pada Strategi Dakwah Pluralisme NU di Era Reformasi

Slamet

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract: This study was aimed at explaining NU's strategies on spreading the idea of pluralism, tracing how NU meant racial differences, how NU react to pluralism on religion, which is a reality of Indonesian society and how NU treated cultures of Indonesian different tribes and custom. The approach used in this study was theological-anthropological one. This study was limited to the time of Gus Dur (1984-1999), K.H. Hasyim Muzadi (1999-2010) and K.H. Said Aqil Siraj (2010up to present). This study found that NU has some strategies in spreading out the idea of pluralism, namely through The Wahid Institute (established by Gus Dur et all), through *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) as a media to spread out the idea of pluralism and the attitude towards racial, language, religion, pluralism tribe, and custom pluralism (established by Hasyim Muzadi), and through *interfaith dialogue* (initiated by K.H. Said Aqil Siraj), which is aimed at respecting differences as a disposition. In addition, NU also gives scholarships for Afghanistan's students to study pluralistic Islam in NU University in Indonesia.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Da'wa, Pluralism, Reformation era.

Abstrak: Pluralitas masyarakat dunia merupakan sebuah keniscayaan. Dengan adanya pluralitas ini, masyarakat diharapkan mampu menghargai perbedaan agama, pemikiran, suku, bangsa, ras, bahasa, dan sebagainya. Namun, pluralitas yang seharusnya menjadi landasan toleransi antarmasyarakat, tak jarang malah melahirkan radikalisme. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia merasa perlu menyampaikan gagasan-gagasan pluralisme kepada dunia demi mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Pluralisme sebagaimana dipahami oleh NU merupakan falsafah yang diilhami secara ideologis dan teologis. Oleh karena itu, perjuangan pluralisme ini dianggap sebagai perjuangan yang sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Termasuk di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai islam yang universal. Selain itu pluralisme merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindarkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-antropologis di seputar konsep pluralisme. Batasan penelitian ini adalah pada masa kepemimpinan Gus Dur (1984-1999), K.H. Hasyim Muzadi (1999-2010) dan K.H. Said Aqil Siraj (2010-sekarang). Hasil penelitian ini bahwa NU memiliki beberapa strategi dalam menyampaikan gagasan pluralismenya, yaitu melalui lembaga *The Wahid Institute* (yang dididikan Gus Dur dkk) dan *International Conference of Islamic Shcolars* (ICIS) yang didirikan

Hasyim Muzadi. Adapun Kiai Said melalui *interfaith dialogue* bertujuan menjaga dan menghormati perbedaan-perbedaan yang dipahaminya sebagai sebagai sebuah fitrah. Selain itu juga dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa Afghanistan untuk belajar Islam pluralis di kampus NU di Indonesia.

Kata-kata kunci: Nahdlatul Ulama, Dakwah, Pluralisme, Era Reformasi.

PENDAHULUAN

Realitas Indonesia sebagai bangsa yang plural merupakan sebuah fitrah yang harus disyukuri. Realitas itu sudah menjadi ketetapan Allah (*sunnatullah*).¹ Pluralitas ini mewujud dalam bentuk budaya, bangsa, suku, agama, serta lainnya. Kesadaran manusia akan realitas dunia yang plural ini terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia itu sendiri. Realitas dunia yang plural ini dalam perjalanan selanjutnya kemudian berkembang menjadi sebuah pluralisme, sebuah paham yang mengakui adanya kemajemukan.²

Di Indonesia, realitas keragaman masyarakat tidak hanya terletak pada budaya atau tradisinya. Lebih dari itu, realitas itu diwujudkan dalam perbedaan agama. Hal itu sangat mudah untuk dilihat, misalnya dari pelbagai perayaan hari-hari besar agama yang diyakini sebagai hari suci bagi agama mereka masing-masing. Seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra' Mi'raj bagi umat Islam. Kemudian perayaan Hari Natal, Wafat dan Kenaikan Yesus Kristus oleh umat Kristiani. Selain itu, ada perayaan Imlek bagi umat Konghuchu, serta Hari Raya Nyepi dan Waisak yang diperingati oleh umat Hindu dan Budha. Inilah sekelumit bukti realitas kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari sisi praktik keagamaannya saja.³

Dengan pluralitas inilah kehidupan manusia di dunia selalu dinamis, melalui terus berkembangnya ilmu pengetahuan. Tanpa perbedaan tidak ada diskusi, tanpa diskusi tidak ada ilmu pengetahuan, dan tanpa ilmu pengetahuan tidak ada kemajuan peradaban. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bahwa perbedaan di antara umat manusia adalah rahmat.⁴

Keragaman akan kebudayaan Indonesia itulah yang menyebabkan pola dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga di tanah Jawa khususnya, lebih pada dakwah yang bersifat kultural. Seperti dengan wayang kulit, syi'ir-syi'ir Jawa, dan sebagainya. Pilihan logis Sunan Kalijaga itu bisa dipahami dari konsepsi sosiologi pengetahuan yang menyatakan bahwa seseorang tidak hidup dalam realitas yang kosong, melainkan dia dibentuk oleh realitas bahkan dia berpikir melalui realitas tempat seseorang tersebut hidup.⁵

Oleh karena itu, pola dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga merupakan refleksi atas realitas kebudayaan yang berkembang ketika itu.

Budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa kemudian dijadikan sebagai media dakwah dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalamnya.

Geertz dalam Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa ekspresi keagamaan seseorang terpengaruh oleh budaya yang berkembang dalam lingkungannya. Ia menggambarkan perbedaan antara Islam di Indonesia yang disebarkan oleh Walisongo—dalam hal ini Geertz menjelaskan tentang Sunan Kalijaga—dan Islam di Maroko yang dikembangkan oleh Lyusi (nama aslinya Abu ‘Ali al-Hasan ibn Mas’ud al-Lyusi). Keduanya dianggap sebagai perwakilan yang sah dari corak keislaman masing-masing, Sunan Kalijaga sebagai bagian dari Walisongo dan Lyusi adalah bagian dari para *sidi*. Keduanya pun diyakini memiliki kemampuan “supranatural” yang sama-sama bersumber dari ajaran sufi. Namun, jika pada Sunan Kalijaga itu disertai semangat sinkretis, Lyusi melambangkan ketegaran moral dan agresivitas.

Dalam menjelaskan segi perbedaan lingkungan budaya itu, Geertz menjelaskan kaitannya dengan kenyataan bahwa Maroko adalah sebuah negeri padang pasir, yang pola kehidupan sosialnya ditandai oleh semangat kabilah atau tribalisme. Sebaliknya, Jawa adalah sebuah negeri pertanian yang amat produktif, damai dan tenang. Ia mengatakan “*in Morocco civilization was built on nerve; in Indonesia, on diligence*” (di Maroko peradaban didirikan di atas saraf, di Indonesia peradaban didirikan di atas ketekunan).⁶

Perbedaan lingkungan itulah yang kemudian menyebabkan pola pikir yang ada pada diri Sunan Kalijaga dan Lyusi berbeda. Realitas itu sesuai dengan teori perkembangan masyarakat yang dikatakan oleh Johannes Muller bahwa setiap politik perkembangan yang mengabaikan kekhasan dari masing-masing masyarakatnya dipastikan akan gagal.⁷ Oleh karena itu, kesuksesan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya untuk melihat realitas masyarakat yang sangat plural di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa.

KONSEP PLURALISME

Istilah pluralisme berasal dari istilah bahasa Inggris *plural* yang merujuk pada jumlah yang lebih dari satu. Dalam konteks falsafah klasik Yunani, lawan dari pluralisme adalah monisme. Keduanya merujuk pada perdebatan dua aliran yang berbeda tentang unsur kewujudan alam dalam pemikiran falsafah metafisik.⁸ Pluralisme dimaknai juga sebagai filsafat yang mengajarkan ada lebih dari satu macam “kebenaran terakhir”, yang dipertentangkan dengan aliran “monisme” atau “dualisme”.⁹

Dalam ranah teologis, pluralisme ditengarai memiliki hubungan dengan pemikiran filsafat yang menandai lahirnya zaman baru yang disebut post-modern di Barat. Kesadaran ini lahir dari kalangan gereja melalui Konsili Vatikan II (1962-1965). Pengakuan gereja terhadap kebenaran Kristen sebagai bukan satu-satunya kebenaran telah menciptakan *plural shock* (kejutan kemajemukan). Eka Darmaputera menjelaskan bahwa kalau dulu agama Kristen yang bermimpi menjadi satu-satunya agama di dunia, tidak saja merasa paling benar, tetapi juga satu-satunya yang benar. Namun kenyataannya agama-agama lain juga tetap hidup subur, sehingga agama Kristen dipaksa atau terpaksa untuk hidup bersama agama-agama lain yang juga mempunyai ajaran yang tidak dapat dipandang rendah atau salah. Dengan demikian, model *plural shock* menjadi semacam keharusan sejarah, dan bagi mereka yang tetap keras kepala bertahan dan tidak mau mengakui kenyataan baru ini akan menjadi orang-orang yang akan tercabut dari kenyataan, menjadi usang dan tidak relevan lagi.¹⁰

Salah satu teolog Kristen yang mengusung pluralisme, Ernst Troeltsch, mengemukakan tiga sikap populer yang perlu dilakukan terhadap agama-agama, yaitu: 1) semua agama relatif, 2) semua agama secara esensial adalah sama, 3)¹¹ semua agama memiliki asal-usul psikologis yang umum. Yang dimaksud dengan relatif adalah bahwa semua agama relatif, terbatas, tidak sempurna dan juga merupakan suatu proses pencarian. Oleh karena itu, kekristenan adalah agama yang terbaik bagi orang Kristen, Hindu adalah yang terbaik untuk orang Hindu.¹²

Alister E. McGrath dalam Kristian Sulisto menjelaskan bahwa pluralisme agama bisa dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu pluralisme agama sebagai sebuah fakta dan pluralisme agama sebagai sebuah ideologi. Pluralisme sebagai sebuah ideologi adalah suatu kepercayaan bahwa pluralisme ini didukung serta diinginkan, dan bahwa klaim-klaim normatif yang berbau imperialistik serta bersifat memecah-belah perlu dibuang.¹³

Menurut Amin Abdullah, dalam konteks keindonesiaan—terlepas dari sejarah besar pluralisme—kerukunan antar umat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk dalam hal agama seperti halnya di Indonesia. Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis.¹⁴

Sementara itu, tokoh pluralisme Indonesia, Gus Dur, ketika menjelaskan tentang makna pluralisme, setidaknya selalu menyampaikan tiga ayat al-Qur'an sebagai berikut: "Tidak ada paksaan dalam agama"; "Bagimu

agamamu dan bagiku agamaku”; dan “Agama (yang diridai) di sisi Allah adalah Islam”. Dari ketiga ayat yang sering disampaikan tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur memegang teguh dan bersikap konsisten terhadap agamanya, bahkan bisa dibilang, Gus Dur bersikap “intoleransi” dalam berteologi.¹⁵ Konsep pluralisme yang dijalani Gus Dur sebenarnya lebih dekat pada konsep yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mengatur diri sendiri dan saling berhubungan serta berdampingan, namun masing-masing kelompok tersebut mempunyai eksistensi yang berbeda.

Definisi pluralisme Gus Dur tersebut memang terlihat mendapatkan pengaruh dari J.S. Furnivall yang menjelaskan bahwa masyarakat plural adalah yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur. Keanekaragaman itu terjadi dalam satu unit politik (wilayah).¹⁶ Konsep tentang masyarakat plural (*plural society*) yang diusulkan oleh J.S. Furnivall (1948) tersebut kemudian dikembangkan oleh Alvin Rabushka dan Kenneth A. Shepsle (1972). Konsep tersebut lebih terkait dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum, bukan spesifik dengan urusan agama.

Terkait dengan pluralisme, Alvin dan Kenneth menjelaskan bahwa paling tidak ada empat unsur utama yang bisa didefinisikan sebuah negara plural, yaitu ras, bahasa, agama, suku dan adat.¹⁷ *Pertama*, ras. Konsep tentang ras mungkin sering menjadi kontroversi dalam kajian ilmu sosial, sebab ras kadang digunakan sebagai represi ideologi suatu golongan dan juga untuk merendahkan satu golongan tertentu karena perbedaan yang ada pada diri mereka masing-masing, seperti, kulit, warna rambut, status sosial, bentuk wajah, dan sebagainya. Namun, perbedaan ras memang salah satu unsur yang paling mudah untuk mengidentifikasi pluralitas.

Kedua, bahasa. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi, bahkan bahasa menyediakan kohesi dan konflik antar kelompok. Selain itu, perbedaan bahasa juga menjadi representasi dari kebudayaan yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, agama. Perbedaan agama merupakan sebuah isu krusial di berbagai negara. Hal itu disebabkan karena sejarah panjang yang biasanya terjadi pada agama-agama tersebut di setiap negara. Bahkan, perbedaan agama ini menyebabkan ekspresi keagamaan dari tiap-tiap pemeluknya berbeda.

Keempat, suku dan adat. Kekerasan sebagaimana yang terjadi di Kongo dan Nigeria mengilustrasikan secara jelas bagaimana sulitnya menyatukan perbedaan suku dalam kendali pemerintahan. Secara ras, masyarakat Afrika adalah sama, namun mereka selalu membeda-bedakan pada suku

dan adat. Hal ini pun berdampak besar pada kondisi politik di Afrika ketika itu. Begitu pula dengan problem di negara-negara yang memiliki pluralitas suku dan adat yang tinggi lainnya.

Dari kesekian teori tentang pluralisme, penulis memilih kerangka teori Alvin dan Kenneth yang merupakan pengembangan dari Teori Masyarakat Majemuk J.S. Furnivall. Alvin dan Kenneth dalam menjelaskan teori tentang masyarakat plural sangat jelas dan melihat pada aspek-aspek kesejarahan, yang memiliki kesamaan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

ISLAM DAN DAKWAH KULTURAL WALISONGO

Sebelum menjelaskan tentang dakwah kultural Walisongo di tanah Jawa, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan tentang makna dari kata dakwah itu sendiri. Secara terminologi, istilah dakwah dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Beberapa definisi dakwah tersebut antara lain:

1. Syeikh Ali Mahfudz, dakwah adalah mendorong manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintahkan berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁸
2. Syukriadi Sambas, dakwah merupakan proses internalisasi, transmisi, difusi, institusionalisasi dan transformasi Islam yang melibatkan unsur da'i, pesan, media, metode, mad'u, tujuan dan respon serta dimensi ruang dan waktu untuk mewujudkan kehidupan yang hasanah di dunia dan akhirat.¹⁹
3. M. Abu al-Fath al-Bayanuni, dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada manusia serta menerapkannya dalam kehidupan manusia.²⁰
4. Taufik al-Wa'i, dakwah adalah mengajak kepada pengesaan Allah dengan menyatakan dua kalimat syahadat dan mengikuti *manhaj* Allah di muka bumi, baik perkataan maupun perbuatan, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, agar memperoleh agama yang diridhai-Nya dan manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.²¹

Dari beberapa pendapat para ahli tentang dakwah, dapat disimpulkan ke dalam beberapa bagian besar yang tidak dipisahkan dari dakwah. *Pertama*, dakwah adalah proses mengajak manusia ke jalan Islam. *Kedua*, landasan dalam berdakwah adalah nilai-nilai Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. *Ketiga*, dakwah Islam memberikan kedamaian bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari definisi tentang dakwah di atas, sangat jelas bahwa proses dakwah tidak dilakukan melalui

jalan perang, melainkan perdamaian. Hal itulah yang dilakukan oleh para da'i dalam menyebarkan Islam di Indonesia pada masa lampau.

Sejarah masuknya Islam di Indonesia memiliki banyak sekali versi. Namun, fakta sejarah yang sampai sekarang masih diyakini kebenarannya bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia, khususnya ke Jawa, tidak langsung dari Arab tetapi dari India. Oleh karena itu, sebelum datang ke Nusantara, Islam sudah terbiasa berinteraksi dengan Hinduisme dan Budhisme. Asimilasi budaya antara Islam dengan unsur-unsur lokal India inilah yang menurut Mukti Ali telah memudahkan proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Jawa yang memang sudah lama mengenal ajaran Hinduisme maupun Budhisme. Di samping itu, proses percepatan tersebarnya Islam juga tidak bisa dilepaskan dari karakter sufisme yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Perlu dicatat di sini bahwa semua penyebar Islam di Jawa, yang kemudian dikenal dengan Walisongo itu adalah kaum sufi.²²

Fakta tersebut seolah memperkuat teori bahwa Islam adalah agama yang universal, sempurna, lentur, elastis dan selalu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.²³ Islam dikenal sebagai salah satu agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal dan ikhtilaf ulama dalam memahami ajaran agamanya.²⁴ Hal itu yang kemudian dipahami sebagai akulturasi budaya, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif unsur kebudayaan asing itu.²⁵

Proses akulturasi Islam dan budaya lokal tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari sejarah bahwa jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, di Nusantara (Indonesia) telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Budhisme, seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.²⁶ Kejayaan dari kerajaan-kerajaan itu pun bertahan cukup lama, sehingga membuat masyarakat memiliki kebudayaan, tatanan sosial, dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupannya.

Akan tetapi setelah proses Islamisasi dimulai sejak abad ke XIII, unsur agama Islam sangat memegang peranan penting dalam membangun jaringan komunikasi antara kerajaan-kerajaan pesisir dengan kerajaan-kerajaan pedalaman yang masih bercorak Hindu-Budha. Misalnya di daerah pesisir utara Jawa, kerajaan-kerajaan yang berdiri umumnya diperintah oleh pangeran-pangeran saudagar. Mereka takluk kepada raja Majapahit. Akan tetapi, setelah raja-raja setempat memeluk agama Islam, maka mereka menggunakan Islam sebagai senjata politik dan ekonomi untuk membebaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan Majapahit.²⁷

Agama-agama yang datang di tanah Jawa sebelum agama Islam sangat berpengaruh terhadap adat-istiadat, pandangan hidup, keyakinan, dan berbagai tata cara keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa fenomena yang muncul dari kepercayaan mereka adalah kepercayaan pemujaan terhadap para dewa, atau para dayang, dan berbagai hantu. Kepercayaan dan praktik keagamaan ini dapat dilihat dari kegiatan upacara atau ritual dan sesaji sebagai simbol ketaatan kepada para dewa. Dalam sesajian ini, setidaknya masyarakat Jawa pada umumnya mengenal empat jenis sesajian, yaitu: sesajian dalam bentuk selamatan yang diperuntukkan bagi para roh yang dianggap suci dan dihormati, sesajian dalam bentuk *penulakan*, sesajian dalam bentuk *wadima* dan sedekah sesajian berupa makanan yang bertujuan untuk keselamatan orang yang sudah meninggal.²⁸

Oleh karena itu, ketika Sunan Kalijaga mendakwahkan Islam di tanah Jawa, maka harus berhadapan langsung dengan tatanan sosial yang sudah mapan dalam masyarakat. Sunan Kalijaga tidak mengubah banyak tampilan bentuk ritualnya, namun secara substansi ritual-ritual itu telah dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya, sesajian untuk orang meninggal kemudian diiringi dengan bacaan Yasin dan Tahlil dan sebagainya.

Melihat realitas yang berkembang di masyarakat ketika itu, maka Islam di Indonesia menjadi sebuah perpaduan yang unik dari dua peradaban yang berbeda. Islam lahir di Arab yang kental dengan tribalisme dan sangat berbeda dengan kebudayaan yang berkembang di tanah Jawa. Kemudian, Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai kaum Islam tradisional merasa memiliki “kewajiban” untuk melestarikan kebudayaan yang sudah berkembang di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Islam. Prinsip yang dipegang teguh oleh NU dalam memperjuangkan Islam keindonesiaan adalah: realitas struktur masyarakat Indonesia yang plural dan kesadaran akan misi dakwah Islam yang membawa pesan universal.

Pertama, pada dasarnya struktur sosial masyarakat paling tidak ditandai dengan dua karakter, yaitu karakter secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, adanya perbedaan-perbedaan antar kelas sosial dan polaritas sosial yang cukup tajam, dalam perspektif sosiologi biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Adapun secara horizontal, struktur sosial masyarakat memiliki kesatuan yang didasarkan pada kesamaan suku, agama, profesi, adat serta perbedaan kedaerahan. *Kedua*, kesadaran akan misi dakwah Islam yang membawa pesan universal. Pesan universal yang dipahami di sini adalah perdamaian, penghargaan terhadap manusia, ketauhidan, dan sebagainya.²⁹ Oleh karena itu, kepekaan Walisongo dalam melihat kompleksitas kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai media dakwah

mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, sebab nilai-nilai dan ajaran Islam disajikan dengan balutan kebudayaan yang sudah bersatu dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Strategi dakwah kultural yang dilakukan oleh Walisongo memberikan pelajaran penting bagi umat Islam bahwasanya kegiatan dakwah adalah proses yang berjalan dengan damai dan bukan mengedepankan kekerasan. Itu pula yang diungkapkan oleh Thomas W. Arnold yang menuliskan sejarah tentang penyebaran Islam di pelbagai negara di dunia. Kesimpulan pokok dari Arnold adalah bahwa Islam disebarkan dengan cara yang damai. Islam tidak disebarkan melalui pedang atau peperangan, eksploitasi, dan pemaksaan. Ada yang melakukan pendekatan dakwah melalui perkawinan, perdagangan, pendekatan sufistik, dan juga ada yang menggunakan pendekatan-pendekatan diplomatis (politis) atau utusan-utusan.³⁰ Artinya, proses dakwah Islam adalah sebuah proses yang damai sebagaimana pesan Islam yang merupakan agama pembawa kedamaian. Ketika dakwah Islam dilakukan dengan proses yang berifat radikal, maka proses itu sudah mencederai makna Islam itu sendiri.

Hasyim Muzadi berpandangan bahwa keharusan menjaga prinsip pluralisme tersebut tidak hanya dalam aspek norma-norma keagamaan, tapi juga dari tinjauan sosiologis. Argumen ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, toleransi dan kerukunan hidup beragama berjalan cukup baik. Islam yang masuk ke Indonesia ber-corak sangat akomodatif terhadap budaya lokal.³¹

MEMAKNAI PERBEDAAN RAS, BAHASA, DAN BUDAYA

Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan berbeda-beda. Mulai dari perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), ras dan suku bangsa (seperti suku Melayu, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya), bahasa (seperti bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Itali, Mandarin, dan sebagainya) dan budaya. Perbedaan-perbedaan yang menonjol itu merupakan upaya Allah untuk mengajarkan kepada manusia tentang perbedaan di antara mereka, sehingga mereka dapat saling mengenal, menghargai, dan menghormati satu sama lain.

Konsep tentang pluralitas ini termaktub dalam al-Qur'an (al-Hujurat: 13) dan melahirkan konsep pluralisme. Terlepas dari perdebatan tentang asal-muasal teori pluralisme, perintah Allah untuk menghormati dan menghargai pluralitas masyarakat sudah dijelaskan lebih dahulu pada masa lahirnya Islam. Termasuk di dalamnya menghargai perbedaan bahasa dan warna kulit (ras), juga diutarakan secara jelas dalam al-Qur'an.

Dalam Q.S. Ar-Rum: 22 Allah menegaskan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Menurut Gus Dur, Hubungan antara agama dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang ambivalen. Dalam mengagungkan Tuhan dan mengungkapkan rasa indah akan hubungan manusia dengan Sang Khalik, agama-agama kerap menggunakan kebudayaan secara massif.³² Dalam hal ini, Gus Dur memaknai agama dan budaya sangat berkaitan erat karena agama yang turun dari “langit” harus mengalami dialektika dengan kebudayaan di mana agama tersebut diturunkan.

Menurut Hasyim Muzadi, pluralitas sebenarnya adalah kodrati. Bahkan dalam al-Qur’an menyebut berbagai jenis manusia untuk menunjukkan macam-macam golongan itu ada dan akan terus ada. Jenis-jenis itu, antara lain, muslim, muttaqin, kafirin, fasiqin, munafiqin, dholimin, nashoro (Nasrani), yahud (Yahudi), shobiin (agama lokal). Tidak mungkin Alquran menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Hanya mungkin tempat, volume, minor, dan mayoritas, serta pergeserannya yang tidak sama. Menurutnya, pluralitas adalah keniscayaan kodrati yang harus dikelola³³ demi menciptakan Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.

MENYIKAPI PLURALITAS AGAMA

Dalam perspektif Islam, perbedaan pada hakikatnya bukanlah suatu masalah yang serius karena merupakan garis ketentuan Allah. Dalam hal ini Islam secara tegas menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yaitu apa yang menjadi tujuan diturunkannya syariat (*maqasid asy-syari’ah*) yang meliputi jaminan atas: *Pertama*, kebebasan agama atau mempertahankan keyakinan, yang berarti syariat diturunkan bertujuan untuk melindungi agama dan keyakinan setiap orang (*hifz ad-din*). *Kedua*, keselamatan jiwa atau fisik dari tindakan di luar ketentuan hukum (*hifz an-nafs*). *Ketiga*, keselamatan atau kelangsungan hidup keturunan atau keluarga (*hifz an-nasl*). *Keempat*, keamanan harta benda atau hak milik pribadi (*hifzu an-mal*). Dan kelima, kebebasan berpendapat dan berekspresi (*hifu al-‘aql*).³⁴

Membincang NU dan pluralisme di era reformasi terdapat tiga tokoh besar yang muncul pada masa itu, yaitu: KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan Ketua Umum PBNU periode 1984-1999, K.H. Hasyim Muzadi (Kiai Hasyim) yang menjabat Ketua Umum PBNU pada tahun 1999-2010, dan Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siraj (Kiai Said) yang merupakan Ketua Umum PBNU periode 2010 sampai sekarang.

Akhmad Khusnul Hakim menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga ayat al-Qur'an yang selalu dikutip Gus Dur dalam ceramah di Pesantren Ciganjur, yaitu: "*Tidak ada paksaan dalam agama*"; "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*"; dan "*Agama (yang diridai) di sisi Allah adalah Islam*". Dari ketiga ayat yang sering disampaikan tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur memegang teguh dan bersikap konsisten terhadap agamanya, bahkan bisa dibalang, Gus Dur bersikap "intoleransi" dalam berteologi.³⁵

Lebih "ekstrem" lagi, Gus Dur juga menulis statemennya dalam buku *Memaafkan Islam* karya Yudhi Haryono bahwa kejahatan terbesar dari sebuah agama bukan terletak pada seberapa besar komunalisme yang dilakukan, melainkan pada paham benar sendiri yang diwariskan.³⁶ Pernyataan Gus Dur tersebut secara tegas menyatakan sikap pluralismenya dalam menghadapi perbedaan agama di Indonesia. termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan oleh Gus Dur yang begitu menghormati pilihan agama dan keyakinan orang lain sebagai konsekuensi atas ideologi Pancasila yang diterapkan di Indonesia.

Pancasila sebagaimana telah disepakati bersama Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan kebebasan beragama dan menjalankan aktivitas ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945). Pluralisme dalam pemahaman Gus Dur di atas merupakan pengejawantahan dari sikap patuh kepada pemerintah yang merupakan *ulil amri* di Indonesia.

Selain itu, statemen Gus Dur tentang "tidak ada paksaan dalam beragama" menjelaskan tentang sikap pluralis, menghormati, dan menghargai agama-agama lain serta tidak "mengizinkan" sebuah agama di Indonesia ini memaksakan pemahamannya kepada agama lain. Gus Dur dalam menyikapi pluralitas agama—dalam hemat penulis—lebih condong kepada pendekatan normatif, baik al-Qur'an maupun Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional. Selain itu, pemahaman pluralisme Gus Dur bisa dikatakan sebagai pluralisme yang tidak hanya sosiologis namun juga pluralisme teologis.

Namun, Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU periode 1999-2000) menyatakan bahwa pluralisme yang diperjuangkan oleh NU di Indonesia adalah pluralisme sosiologis, bukan pluralisme teologis. Pluralisme teologis justru merugikan teologi semua agama. Tidak ada keimanan atau keyakinan "tahu campur" dalam agama. Menurutnya, masalah teologi dan ritual (transenden) adalah hak original agama masing-masing yang tidak boleh dicampuri dari luar. Oleh karena itu, doa bersama lintas agama bukanlah

tukar-menukar teologi atau keimanan, namun sekedar tempat dan waktu yang bersamaan.

Adapun pluralisme sosiologis merupakan kebersamaan “umat” beragama dalam komunitas keduniaan atau *immanent* sebagai pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika atau *unity in diversity*, karena setiap agama di luar teologi dan ritualnya pasti ada ruang humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu. Menurut Hasyim, hal yang ia sampaikan mengenai pluralisme itu telah disampaikan dan disepakati melalui utusan *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) Vatikan, Wina, WCC/Kristen di Porto Alegre Brazilia dalam Assembly ke-9 tahun 2006, dan dengan Katolik Ortodox di Moskow dan para biksu di Thailand.³⁷

Tak hanya Gus Dur dan Hasyim Muzadi yang memiliki pandangan atau sikap terkait perbedaan agama, K.H. Said Aqil Siraj (Ketua Umum PBNU periode 2010-sekarang) juga memiliki pandangan yang lebih singkat daripada keduanya. Ia menjelaskan tentang perbedaan agama adalah sebuah fitrah dan umat Islam tidak boleh memaksakan seseorang dalam beragama. Islam, Nasrani, dan Yahudi adalah agama yang sama-sama bersumber dari Allah dan sama-sama membawa pesan perdamaian. Oleh karena itu, masyarakat NU harus menghormati perbedaan agama dan keyakinan.³⁸ Pernyataan Said Aqil ini menegaskan corak pemahamannya yang menggunakan pendekatan historis dalam memaknai pluralitas agama, baik di Indonesia maupun di dunia.

Ketiga tokoh di atas—Gus Dur, Hasyim Muzadi, dan Kiai Said—memiliki “gaya” analisis yang berbeda dalam menjelaskan sikapnya terkait pluralisme agama. Gus Dur lebih kepada pendekatan normatif, Kiai Hasyim lebih memahami pluralisme sebagai sebuah realitas sosial atau dari pendekatan sosiologis, sedangkan Kiai Said melihat pluralisme agama sebagai sebuah kenyataan sejarah, atau lebih kepada pendekatan historis. Namun, dari perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut, ada satu kesimpulan yang sama tentang makna pluralisme agama dari para tokoh-tokoh NU, yaitu menghargai dan menghormati hak-hak manusia untuk beragama dan menjalankan ibadahnya.

STRATEGI DAKWAH PLURALIS

Gus Dur dan The Wahid Institute³⁹

Berdiri sejak 7 September 2004, the Wahid Institute (WI) adalah lembaga yang memiliki visi untuk mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di

kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dalam berbagai programnya, WI menggelar kegiatan di lingkungan aktivis muslim progresif dan dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh politik di dunia Islam dan Barat. Lembaga ini diinisiasi oleh almarhum K.H. Abdurrahman Wahid, Dr. Gregorius James Barton, Yenny Zannuba Wahid, dan Ahmad Suaedy. Adapun misi dari The Wahid Institute adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan, merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran,
2. Mengembangkan dialog antara budaya lokal dan internasional demi memperluas harmoni Islam dengan berbagai kebudayaan budaya dan agama di dunia,
3. Mendorong beragam inisiatif untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia dalam penguatan demokrasi,
4. Mempromosikan partisipasi aktif dari beragam kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan dialog perdamaian,
5. Mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Untuk menyampaikan gagasan-gagasan pluralisme, demokrasi, dan sebagainya, The Wahid Institute juga menerbitkan pelbagai macam buku sebagai media untuk mentransformasikan gagasan-gagasan pluralisme ala Gus Dur kepada seluruh masyarakat.

Hasyim Muzadi dan ICIS

International Conference of Islamic Scholars (ICIS) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2004 sampai dengan prakarsa KH. Ahmad Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU periode 1999-2010) dan Dr. N. Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009). Ide pembentukan ICIS berasal dari momentum perubahan hubungan politik antara Islam dan Barat yang disebabkan oleh serangan 9 September 2001. Dampak dari World Trade Centre runtuh di New York itu semakin memanaskan suhu ketegangan antara kedua belah pihak karena telah merusak simbol kekuatan ekonomi dunia yang menjadi titik awal bagi pemerintah AS dengan sekutunya menabuh genderang perang terhadap terorisme global. Kampanye perang Amerika melawan terorisme adalah dampak tidak langsung pada posisi umat Islam sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas setiap tindakan teror selama bertahun-tahun.

Ketegangan tinggi Islam dan Barat juga dirasakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan penduduk

muslim terbesar di dunia. NU sebagai organisasi massa terbesar Islam di Indonesia dengan misi untuk mempromosikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) disebut untuk melepaskan ketegangan terhadap perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai universal Islam.⁴⁰ Secara struktural, awalnya ICIS berada di bawah PBNU sebagai lembaga internasional yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi NU dan tokoh-tokoh muslim dunia untuk menanggapi isu-isu global. Namun, meski awalnya berdiri atas nama NU, semenjak kepemimpinan KH. Said Aqil Siraj (2010-sekarang) ICIS dipisahkan secara struktural dari PBNU. Meski begitu, ide-ide dan gagasan yang disampaikan dalam ICIS adalah gagasan NU dan melibatkan tokoh-tokoh NU.

Kiai Said dan *Interfaith Dialogue*

Untuk mentransformasikan gagasan pluralismenya, Kiai Said menyampaikannya melalui *interfaith dialogue*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang dilakukan pada 23 Oktober 2012 lalu ketika menerima kunjungan dari tokoh agama Serbia di Gedung PBNU. Ia menjelaskan bahwa kepada sesama agama harus menghormati karena ada pesan yang sama, dan terlebih untuk Nasrani dan Yahudi, Allah telah menjelaskannya di dalam al Qur'an.⁴¹ Meski demikian, bukan berarti Kiai Said menganggap semua agama benar. Akan tetapi, pluralisme yang dimaksud adalah mengarah ke persoalan sosial. Menurutnya, harus diakui bahwa semua agama mempunyai keinginan yang baik, mereka juga mempunyai cita-cita yang baik. Adapun ketika menyikapi pluralitas yang ada di Indonesia, ia menuturkan bahwa pluralisme atau kebhinnekaan itu anugerah. Pluralisme harus dijaga untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang kuat dan berperadaban, yang *mutamaddin*.⁴²

Selain dengan *interfaith dialogue*, pada tahun 2013 Kiai Said juga memberikan beasiswa bagi para pelajar Afghanistan untuk belajar tentang Islam Indonesia yang pluralis. Para pelajar tersebut diharapkan mampu memahami Islam yang pluralis ala nahdliyin. Pendidikan itu dilakukan di Universitas NU yang ada di Jawa Tengah, yaitu Universitas Wahid Hasyim Semarang.⁴³

PENUTUP

NU sebagai organisasi Islam yang mengusung pluralisme di Indonesia, memiliki pelbagai macam cara untuk mentransformasikan gagasan pluralismenya. Ideologi pluralisme menurut NU adalah sebuah fitrah manusia yang hidup di tengah pluralitas. Oleh karena itu, NU melalui Gus Dur,

Hasyim Muzadi, dan Kiai Said memiliki cara-cara yang berbeda dalam mentransformasikan gagasan-gagasan pluralismenya. Gus Dur mencoba mentransformasikannya melalui The Wahid Institute, Hasyim Muzadi melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS), dan Kiai Said melalui Interfaith Dialogue dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Afghanistan agar belajar Islam pluralis di Indonesia.

ENDNOTES

¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 56. Terkait dengan realitas kemajemukan sebagai sebuah *sun-natullah*, telah dijelaskan dalam Q.S. Hud: 118-119: “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat; kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka; Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan. Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”

² Amir Tajrid, *Menjadikan Pluralitas Agama Sebagai Media Integrasi Sosial: Ikhtiar Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, paper the 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

³ Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur’an Tentang Keragaman Agama* (Jakarta: R.M. Books, 2007), hlm. 1.

⁴ Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 213.

⁵ Supriyanto, “Dakwah Sinkretis Sunan Kalijaga”, *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009, 10-19.

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 544.

⁷ Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 12.

⁸ Lebih lengkap lihat Colin E. Gunton, *The One, The Three, and The Many* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

⁹ Osman Raliby, *Kamus Internasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 414.

¹⁰ Eka Darmaputera, “Tugas Panggilan Bersama Agama-Agama di Indonesia”, dalam Dr. T.B. Simatupang dkk, *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1987), h. 133.

¹¹ Terkait dengan pernyataan bahwa semua agama secara esensial sama, Alister E. McGrath menyatakan bahwa “All the religious traditions of humanity are equally valid path to the same core of religious reality. In pluralism, no one religious is superior to any other; the many religious are considered equally valid ways to know God.” Lebih lengkap lihat, Alister E. McGrath, *Christian Theology: An Introduction* (Oxford: Blackwell Publisher, 1994), hlm. 458-459.

¹² Paul F. Knitter, "No Other Name?" dalam Stevri I. Lumintang, *Theologia Abu-abu: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Teologi Kristen Masa Kini* (Malang: Gandum Press, 2004), hlm. 67.

¹³ Kristian Sulisto, "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis", *Jurnal Veritas* Vol. 2, No. 1, April 2001, hlm. 51-69. Lebih lengkap lihat Alister McGrath, "The Challenge of Pluralism for the Contemporary Christian Church," *Journal JETS*, Vol. 35, No. 3, September 1992, hlm. 361.

¹⁴ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hlm. 5.

¹⁵ Ahmad Husnul Hakim, "Rahasia Pluralisme Gus Dur", dalam Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47> (diakses 24 Desember 2013).

¹⁶ Alvin Rabushka and Kenneth A. Shepsle, *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability* (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1972), hlm. 11.

¹⁷ Alvin Rabushka and Kenneth A. Shepsle, *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability, ...* hlm. 8-10.

¹⁸ Syekh Ali Mahfudz, *Hidayah al-Mursyidiin*, Cet. ke VII (Mesir: Daar al-Mishr, 1975), hlm. 7.

¹⁹ Agus Ahmad Safei, *Memimpin dengan Hati yang Selesai: Jejak Langkah dan Pemikiran Baru Dakwah K.H. Syukriadi Sambas* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 119.

²⁰ M. Abu al-Fath al-Bayanuni, *al-Madkhal 'ilaa 'ilmi al-Da'wah* (Beirut: Muassasah a-Risaalah, 1991), hlm. 17.

²¹ Taufik al-Wa'i, *al-Dakwah ila Allah*, Cet. ke-II (Mesir: Dar al-Yaqin, 1995), hlm. 19.

²² Abu Hapsin, "Islam dan Budaya Lokal: Ketegangan Antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa," dalam *the 10th Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin, 1-4 November 2010.

²³ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. III (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 287-288.

²⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I (Bandung: Pustaka Islamika, 2008), hlm. 275-276.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus-Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 134.

²⁶ Hamka, *Sejarah Umat Islam IV, Cet. III* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 25-30.

²⁷ M. Arsyad AT, "Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2012, hlm. 211-220.

²⁸ Sulkhan Chakim, "Potret Islam Sinkretisme: Praktek Ritual Kejawan?," *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 1-9.

²⁹ Sulkhan Chakim, "Strategi Dakwah dan Kemajemukan Masyarakat," *Jurnal Komunika*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2007, hlm. 137-147.

³⁰ Lebih lengkap lihat Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam* (New Delhi: Low Price Publications, 1990).

³¹ Hal ini didasarkan pada salah satu pandangan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Lihat, Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (Bandung: Mizan: 1998), hlm. 68.

³² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 291.

³³ Hasyim Muzadi, "Ramadhan, Pluralitas, dan Pluralisme," *Suara Merdeka*, 23 Juli 2012. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/23/193670/Ramadan-Pluralitas-Pluralisme> (diakses 2 Januari 2013).

³⁴ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 55. Lihat juga Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta, Paramadina, 1995), hlm. 546. Selain itu, lihat juga Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), hlm. 62.

³⁵ Ahmad Husnul Hakim, "Rahasia Pluralisme Gus Dur", dalam Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47> (diakses 24 Desember 2013).

³⁶ M. Yudhi Haryono, *Memaafkan Islam* (Jakarta: Kalam Nusantara Press, 2005), halaman cover.

³⁷ Nam (red), "Hasyim Luruskan Konsep Pluralisme" dalam <http://www.nu.or.id>. Diakses 24 Desember 2013.

³⁸ Said Aqil Siraj, dalam "Silaturahmi Tokoh Agama Serbia-Indonesia" di Gedung Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, 25 Oktober 2013, *video tidak dipublikasikan*.

³⁹ www.wahidinstitute.org

⁴⁰ Blog resmi International Conference of Islamic Scholars (ICIS), www.icisjakarta.blogspot.com (diakses 23 Desember 2013).

⁴¹ Said Aqil Siraj, dalam "Silaturahmi Tokoh Agama Serbia-Indonesia" di Gedung Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, 25 Oktober 2013, *video tidak dipublikasikan*.

⁴² Nam (red), "Said Aqil: Pluralisme itu Anugerah" dalam www.nu.or.id, diakses 4 Januari 2014.

⁴³ Asnawi Lathif, Mukafi Niam (red), "Penerima Beasiswa NU dari Afghanistan Dikunjungi Dubesnya" dalam www.nu.or.id, diakses 4 Januari 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bayanuni, M. Abu al-Fath. 1991. *al-Madkhal 'ilaa 'Ilmi al-Da'wah*. Beirut: Muassasah a-Risaalah.
- Arnold, Thomas W. 1990. *The Preaching of Islam*. New Delhi: Low Price Publications.
- Arsyad AT, M. 2012. "Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2012, 211-220.
- Chakim, Sul Khan. 2009. "Potret Islam Sinkretisme: Praktek Ritual Kejawan?," *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009, 1-9.
- _____. 2007. "Strategi Dakwah dan Kemajemukan Masyarakat," *Jurnal Komunika*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2007, 137-147.
- Darmaputera, Eka. 1987. "Tugas Panggilan Bersama Agama-Agama di Indonesia",

- dalam Dr. T.B. Simatupang dkk, *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Gunton, Colin E. 1993. *The One, The Three, and The Many*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakim, Ahmad Husnul. TT. "Rahasia Pluralisme Gus Dur", dalam Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47> (diakses 24 Desember 2013).
- Hamka. 1981. *Sejarah Umat Islam IV, Cet. III*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hapsin, Abu. 2010. "Islam dan Budaya Lokal: Ketegangan Antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa," dalam *the 10th Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin, 1-4 November 2010.
- Haryono, M. Yudhi. 2005. *Memaafkan Islam*. Jakarta: Kalam Nusantara Press.
- Khadziq. 2009. *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Knitter, Paul F. 2004. "No Other Name?" dalam Stevri I. Lumintang, *Theologia Abu-abu: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Teologi Kristen Masa Kini*. Malang: Gandum Press.
- Lathif, Asnawi, Mukafi Niam (red), "Penerima Beasiswa NU dari Afghanistan Dikunjungi Dubesnya" dalam www.nu.or.id, diakses 4 Januari 2014.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfudz, Syeikh Ali. 1975. *Hidaayah al-Mursyidiin*, cet ke VII. Mesir: Dar al-Mishr.
- McGrath, Alistair E. 1994. *Christian Theology: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publisher.
- _____. 1992. "The Challenge of Pluralism for the Contemporary Christian Church," *Journal JETS*, Vol. 35, No. 3, September 1992, 361.
- Mubarak, Jaih, 2008. *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I. Bandung: Pustaka Islamika.
- Muller, Johannes. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- al-Munawar, Said Agil Husin. 2003. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. III. Jakarta: Ciputat Press.
- Muzadi, Hasyim. 1999. *Nadhlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos.
- _____, "Ramadhan, Pluralitas, dan Pluralisme," *Suara Merdeka*, 23 Juli 2012. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/23/193670/Ramadan-Pluralitas-Pluralisme> (diakses 2 Januari 2013).
- Nam (red), "Hasyim Luruskan Konsep Pluralisme" dalam <http://www.nu.or.id>, diakses 24 Desember 2013.
- _____, "Said Aqil: Pluralisme itu Anugerah" dalam www.nu.or.id, diakses

4 Januari 2014.

- Rabushka, Alvin and Kenneth A. Shepsle. 1972. *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Raliby, Osman. 1982. *Kamus Internasional*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Riyadi, Hendar. 2007. *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an Tentang Keragaman Agama*. Jakarta: R.M. Books.
- Safei, Agus Ahmad. 2003. *Memimpin dengan Hati yang Selesai: Jejak Langkah dan Pemikiran Baru Dakwah K.H. Syukriadi Sambas*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, Alwi. 1997. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Siraj, Said Aqil, dalam "Silaturahmi Tokoh Agama Serbia-Indonesia" di Gedung Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, 25 Oktober 2013, *video tidak dipublikasikan*.
- Sulisto, Kristian. 2001. "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis", *Jurnal Veritas* Vol. 2, No. 1, April 2001, 51-69.
- Supriyanto, 2009. "Dakwah Sinkretis Sunan Kalijaga", *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009, 10-19.
- Syah, Ismail Muhammad dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tajrid, Amir. 2009. *Menjadikan Pluralitas Agama Sebagai Media Integrasi Sosial: Ikhtiar Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, paper the 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- al-Wa'i, Taufik. 1995. *al-Dakwah ilaa Allah*, cet ke-II. Mesir: Daar al-Yaqiin.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- _____. 1995. "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Paramadina.

Internet:

- Blog resmi International Conference of Islamic Scholars (ICIS), www.icisjakarta.blogspot.com (diakses 23 Desember 2013).
- <http://www.wahidinstitute.org>